

## RENCANA PENGGUNAAN SIREKAP PADA PILKADA 2024

Rais Agil Bahtiar\*

1

### Abstrak

*Pada Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kembali menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap,) meskipun sistem ini mendapat kritik dan mengalami berbagai tantangan dalam Pemilu 2024. Artikel ini mengkaji rencana penggunaan Sirekap pada Pilkada 2024 beserta tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah persiapan yang diperlukan. Hasil kajian menunjukkan, Sirekap berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik dengan menyediakan data rekapitulasi yang transparan dan akurat. Namun, kendala teknis seperti gangguan konektivitas internet dan kurangnya pelatihan petugas pemilu menjadi hambatan utama. Untuk mengatasi masalah ini, peningkatan infrastruktur teknologi, penyediaan perangkat keras dan lunak yang andal, serta pelatihan intensif bagi petugas pemilu sangat diperlukan. Selain itu, peningkatan keamanan siber dan pengawasan independen juga menjadi fokus utama untuk menjamin integritas sistem. Melalui fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI perlu mendorong KPU untuk mengatur detail teknis penggunaan Sirekap, menetapkan standar pelatihan bagi petugas, menyusun mekanisme pengawasan serta audit yang komprehensif untuk memastikan integritas dan transparansi Sirekap.*

### Pendahuluan

Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) mendapatkan sorotan publik karena dituding menjadi salah satu faktor yang membuat kekisruhan di antara pendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Meskipun demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

akan menggunakan Sirekap dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 (Kasmara, 2024).

KPU dengan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik, menegaskan bahwa Sirekap akan tetap digunakan pada penyelenggaraan Pilkada 2024 tanggal 27 November 2024 meskipun mendapatkan banyak sorotan.

\* Analis Legislatif Ahli Muda, Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. Email: rais.bahtiar@dpr.go.id.



KPU berpendapat, pemutakhiran Sirekap adalah bagian dari tradisi pengembangan sistem informasi yang dilakukan berdasarkan evaluasi dari pemilu sebelumnya. Menanggapi kritik dari berbagai pihak, KPU telah berencana melakukan sejumlah perbaikan dan pembenahan pada sistem ini, termasuk peningkatan kualitas sistem komputasi dan pelatihan bagi petugas pemilu (Pratama, 2024). Dalam konteks persiapan, KPU juga menjadwalkan rapat dengan Komisi II DPR RI untuk membahas kesiapan penggunaan Sirekap. Rapat ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang akan digunakan dapat beroperasi dengan baik dan sesuai dengan harapan publik (Trismawan, 2024). Artikel ini mengkaji rencana penggunaan Sirekap dalam Pilkada 2024 beserta tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah persiapan yang diperlukan.

### **Manfaat dan Tantangan Penggunaan Sirekap**

Teknologi dan informasi menjadi salah satu instrumen transparansi dan akuntabilitas pemilu untuk menyelenggarakan pemilu yang efektif dan efisien. Dalam konteks Pemilu, partisipasi politik cenderung meningkat seiring dengan peningkatan kesadaran politik dan kepentingan publik terhadap proses politik. Faktor-faktor seperti pentingnya pemilihan dalam menentukan arah kebijakan publik, persaingan antar kandidat yang kuat, serta kampanye politik yang intensif seringkali membangkitkan minat dan motivasi warga untuk turut serta dalam pemilihan (Bram, 2023). Selain itu, semakin meningkatnya akses informasi dan penyebaran teknologi komunikasi yang memungkinkan

interaksi yang lebih cepat dan luas antara kandidat dan pemilih juga dapat meningkatkan partisipasi politik dalam Pemilu (Yahya, *et al.*, 2024). Pendekatan teknologi ini juga mulai banyak diadopsi di Indonesia, salah satunya dengan Sirekap.

Sirekap merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan data hasil Pemilu secara resmi. Keterlibatan Sirekap dalam proses pemilihan umum secara tidak langsung dapat memengaruhi partisipasi politik. Dengan adanya sistem yang transparan dan akurat seperti Sirekap, pemilih cenderung lebih percaya pada integritas dan keabsahan proses pemilihan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Pemilu dan mendorong partisipasi politik yang lebih aktif, karena warga merasa bahwa suara mereka akan dihitung dengan benar dan hasilnya akan tercermin secara akurat dalam hasil pemilihan. Sebaliknya, jika terjadi keraguan atau kecurigaan terhadap integritas sistem seperti Sirekap, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada proses pemilihan dan menghambat partisipasi politik (Hardiyanti, *et al.*, 2022).

Penggunaan Sirekap memberikan manfaat yang signifikan dalam konteks transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam proses Pemilu (Pradesa, 2024). *Pertama*, Sirekap memperkuat transparansi dengan menyediakan akses publik terhadap data rekapitulasi suara secara langsung. Ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan memverifikasi hasil pemilihan dengan lebih baik, meningkatkan kepercayaan terhadap integritas proses pemilu. Dengan demikian, Sirekap membantu mendorong partisipasi publik dalam

pemantauan proses demokratis, yang merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan demokrasi.

*Kedua*, Sirekap meningkatkan akurasi data dengan mengurangi risiko kesalahan manusia dalam proses rekapitulasi suara. Dengan data langsung diambil dari formulir C1 yang diisi oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Sirekap meminimalkan potensi kesalahan dalam penginputan data, sehingga menghasilkan data yang lebih konsisten dan akurat. Akurasi data yang ditingkatkan ini memungkinkan KPU untuk menghasilkan hasil pemilihan yang lebih andal dan diakui secara luas, memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses pemilihan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, Sirekap membantu memperkuat integritas dan kepercayaan terhadap proses pemilihan umum, yang merupakan landasan bagi pembangunan demokrasi yang kuat dan berkelanjutan (Inzana, *et.al.*, 2024).

Di lain sisi, Sirekap juga mengalami berbagai tantangan selama pelaksanaan Pemilu 2024, terutama terkait kendala teknis. Beberapa wilayah melaporkan gangguan konektivitas internet yang menghambat proses pengiriman data. Selain itu, sistem mengalami *crash* dan *bug* yang menyebabkan data rekapitulasi tidak dapat diinput secara akurat dan tepat waktu. Permasalahan ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi di Indonesia, terutama di daerah terpencil, masih perlu ditingkatkan untuk mendukung implementasi sistem rekapitulasi elektronik yang andal.

Kurangnya pelatihan bagi petugas pemilu tentang cara menggunakan Sirekap juga menjadi

masalah utama. Banyak petugas yang belum memahami sepenuhnya prosedur pengoperasian sistem ini, sehingga terjadi kesalahan input data dan kesalahan teknis lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa program pelatihan dan sosialisasi harus lebih diperkuat untuk memastikan semua petugas pemilu mampu menggunakan Sirekap dengan benar.

Meskipun Sirekap bertujuan untuk meningkatkan transparansi, kepercayaan publik terhadap sistem ini masih menjadi tantangan. Beberapa kasus kecurangan yang diduga melibatkan manipulasi data elektronik mencuat, memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu yang dihasilkan melalui Sirekap. Kepercayaan publik perlu dibangun melalui transparansi dalam pengoperasian sistem dan penyediaan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Pengawasan terhadap penggunaan Sirekap juga memerlukan peningkatan. Pengawasan yang kurang ketat memungkinkan celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk kecurangan. Regulasi yang lebih jelas dan tegas terkait penggunaan teknologi dalam pemilu diperlukan untuk menjamin integritas proses pemilu.

### **Persiapan Penggunaan Sirekap pada Pilkada 2024**

Persiapan penggunaan Sirekap untuk Pilkada 2024 memerlukan langkah-langkah yang komprehensif dan terencana dengan baik. *Pertama*, peningkatan infrastruktur teknologi menjadi prioritas utama. Semua wilayah, terutama daerah terpencil, harus memiliki akses internet yang stabil dan cepat. *Kedua*, penyediaan perangkat keras dan lunak yang andal

serta *up-to-date* juga penting untuk memastikan Sirekap berfungsi optimal. *Ketiga*, pengembangan dan pengujian sistem secara menyeluruh perlu dilakukan. Perbaikan dan peningkatan berdasarkan evaluasi sebelumnya harus diterapkan, diikuti dengan uji coba sistem dalam skala besar untuk memastikan bahwa Sirekap dapat berfungsi di berbagai kondisi jaringan dan lingkungan.

Pelatihan dan edukasi juga memainkan peran penting. Program pelatihan intensif bagi petugas pemilu mencakup penggunaan perangkat keras dan lunak, prosedur rekapitulasi suara, serta penanganan masalah teknis. Edukasi publik tentang cara kerja dan manfaat Sirekap diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem baru ini. Keamanan dan pengawasan harus diperkuat dengan langkah-langkah keamanan siber yang kuat, seperti enkripsi data dan autentikasi multi-faktor, serta monitoring jaringan secara *real-time*.

Pengawasan independen dari masyarakat juga penting untuk memastikan integritas sistem. Selain itu, panduan teknis yang rinci harus disediakan untuk petugas pemilu agar pelaksanaan Sirekap seragam dan efektif. Simulasi pemilu secara berkala dan evaluasi berkelanjutan setelah setiap simulasi dan pemilu juga diperlukan untuk menguji kesiapan sistem dan mengidentifikasi serta memperbaiki potensi masalah. Dengan persiapan matang dalam aspek infrastruktur, pengembangan sistem, pelatihan, keamanan, regulasi, dan evaluasi, penggunaan Sirekap pada Pilkada 2024 diharapkan dapat berjalan sukses dan meningkatkan kualitas proses Pemilu dan Pilkada di Indonesia.

## Penutup

Penggunaan Sirekap pada Pilkada 2024 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pemilihan. Meskipun sistem ini menghadapi berbagai tantangan, seperti masalah teknis dan ketidakpercayaan publik, perbaikan terus dilakukan untuk memastikan keberhasilannya. KPU perlu membuktikan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sistem dan memberikan pelatihan yang memadai bagi petugas Pilkada.

Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan, dapat memastikan Sirekap digunakan secara efektif dan efisien, serta meminta laporan berkala perkembangan implementasi Sirekap, evaluasi terhadap uji coba yang telah dilakukan, dan langkah-langkah perbaikan yang sedang dilakukan. Komisi II DPR RI juga perlu mendorong KPU untuk mengatur detail teknis penggunaan Sirekap, menetapkan standar pelatihan bagi petugas, menyusun mekanisme pengawasan, serta audit yang komprehensif untuk memastikan integritas dan transparansi Sirekap. Selain itu melalui fungsi anggaran, Komisi II DPR RI juga perlu memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk pengembangan dan pemeliharaan Sirekap, termasuk penyediaan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan di seluruh wilayah, terutama daerah terpencil.

## Referensi

Bram, C. (2023). The most important election of our lifetime: Focalism and political participation. *Political Psychology*, 44(5), 943-960. <https://doi.org/10.1111/>

- pops.12868.
- Hardiyanti, M., et al. (2022). Urgensi sistem e-voting dan Sirekap dalam penyelenggaraan pemilu 2024. *Journal Equitable*, 7(2), 249-271. <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i2.4257>.
- Inzana, N., Maulana, A., & Sari, P.M. (2024). Inovasi Sirekap dalam meningkatkan partisipasi politik. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 1-13. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.106>.
- Kasmara, I. (2024, Juli 11). Nurlia Dian Faramita: Sampaikan dulu saja hasil evaluasi Sirekap. *Rm.id*. RM. <https://rm.id/baca-berita/blakblakan/227366/walau-banyak-dikritik-kpu-tetap-akan-gunakan-sirekap-buat-pilkada-2024-nurlia-dian-faramita-sampaikan-dulu-saja-hasil-evaluasi-sirekap>
- Pradesa, I.A. (2024). Analisis penggunaan sistem rekapitulasi suara (Sirekap) dalam menghadapi problematika Pemilu 2024. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 3(4), 47-57.
- Pratama, F.A. (2024, Juli 08). KPU pakai Sirekap di Pilkada 2024 demi keterbukaan informasi. *Tirto*. <https://tirto.id/kpu-pakai-sirekap-di-pilkada-2024-demi-keterbukaan-informasi-g1m2>
- Trismawan, B. (2024, Juli 08) Tetap pake Sirekap, KPU nggak ada kapok-kapoknya. *RM*. <https://rm.id/baca-berita/pilkada/226962/tetap-pake-sirekap-kpu-nggak-ada-kapokkapoknya>
- Yahya, M., et al. (2024). Twitter and online trust: Ganjar Pranowo and Anies Baswedan towards the 2024 Presidential Election. *Nyimak: Journal of Communication*, 8(1), 1-19. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/nyimak.v8i1.8730>.